**SIKAP BAHASA MANUSIA INDONESIA SEBAGAI PRAKTIK
KEBERBAHASAAN DALAM PERSPEKTIF KE-AUSTRONESIAAN**

*The Attitude of Indonesian Language as a Language Practice
in Austronesian Perspective*

Arif Setyawan

Univeritas Sebelas Maret

Jalan Ir. Sutami No.36, Ketingan, Kec. Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57126

E-mail: setyawan161087@gmail.com

ABSTRACT

Language reality of Indonesian people shows a language variety including local language, foreign language, and language of Indonesia. Unfortunately, language attitude of Indonesian people as a language practice indicates a negative phenomenon. The language practice forms through habitat variety foundation with a support of variance and also a bet in modal and consideration of domain variance which influence by the domination of dominant agents practice. A negative phenomenon indication of the language attitude should not occur because the Austronesian characteristic in Indonesia is can not deny, either in the context of history, sociocultural, and the language itself. Therefore, an awareness to the Austronesian is become an important point for Indonesian people to develop the language attitude as a language practice that put the language reality wisely.

Keywords: *Language Attitude, Language Practice, and Austronesian Perspective*

ABSTRAK

Realitas kebahasaan manusia Indonesia menunjukkan adanya ragam bahasa, meliputi bahasa daerah, bahasa asing, dan bahasa Indonesia. Sayangnya, sikap Bahasa manusia Indonesia sebagai sebuah praktik keberbahasaan menunjukkan gejala yang negatif. Praktik keberbahasaan tersebut terbentuk melalui pondasi ragam habitus dengan dukungan ragam sekaligus pertarungan modal dan pertimbangan ragam ranah yang dipengaruhi oleh dominasi praktik agen-agen pendorong. Gejala negatif sikap bahasa sepatutnya tak terjadi, mengingat ke-Austronesiaan di Indonesia menjadi hal yang tak dapat dipungkiri, baik dalam konteks kesejarahan, sosio-kultural, hingga keberbahasaan itu sendiri. Oleh sebab itu, kesadaran ke-Austronesiaan menjadi hal penting bagi manusia Indonesia guna menumbuh-kembangkan sikap bahasa sebagai praktik keberbahasaan yang mampu menempatkan realitas kebahasaan dengan bijak.

Kata kunci: Sikap Bahasa, Praktik Keberbahasaan, dan Perspektif Ke-austronesiaan.

PENDAHULUAN

Perkelindanan ragam bahasa bagi manusia Indonesia menjadi sebuah kenyataan yang tak tertolakkan, baik secara historis maupun praktik kekinian. Hadirnya bahasa daerah, bahasa asing, dan

juga bahasa Indonesia, menjadi bukti dari perkelindanan tersebut. Akan tetapi satu hal yang patut disayangkan, tidak semua ragam bahasa memiliki ruang sosial –baca ranah sosial– dalam praktik keberbahasaan guna pemerolehan ragam modal bagi pelaku

bahasa, seperti modal sosial, modal kultural, modal religi, dan terkhusus modal kapital. Hal tersebut menjadi pemicu ragam “sikap negatif” dari pelaku bahasa terhadap bahasa yang ada, misalnya pengagungan salah satu bahasa; sikap keengganan pemertahanan pelaku bahasa terhadap bahasa yang dimilikinya, dalam hal ini terkhusus ialah bahasa daerah; kurang penghargaan terhadap suatu bahasa, dan berbagai sikap bahasa negatif lainnya.

Berkenaan dengan ruang sosial dalam praktik keberbahasaan guna pemerolehan modal, terkhusus berkenaan dengan bahasa daerah, Collins (2014:150-180) mengungkapkan bahwa semestinya terdapat ranah yang menyokong dan memungkinkan penggunaan bahasa daerah. Ruang sosial bagi bahasa daerah tentu saja masih ada meski terbatas. Akan tetapi satu hal yang tak dapat dipungkiri bahwa ruang sosial bahasa daerah tak semenarik bahasa Indonesia dan bahasa asing bagi pelaku keberbahasaan manusia Indonesia. Hal tersebut timbul karena praktik keberbahasaan bahasa daerah kurang menjanjikan pemerolehan “modal”, terkhusus modal kapital¹, bagi pelaku keberbahasaan. Simak saja realitas di mana penguasaan bahasa asing menjadi nilai lebih bagi seseorang ketika melamar pekerjaan, mendapatkan beasiswa, dan lain sebagainya, dibandingkan penguasaan terhadap bahasa daerah, bahkan bahasa Indonesia sekali pun. Hal tersebut tentunya menjadi penanda kurangnya ruang sosial bahasa daerah.

1 Meski tidak dapat dipungkiri, akhir-akhir ini cukup membumi lagu-lagu yang digandrungi kaum milenial yang dibawakan dalam bahasa daerah, khususnya bahasa Jawa. Akan tetapi, hal tersebut belum menjadi indikasi ketersediaan ruang sosial bagi bahasa daerah, sebab bahasa daerah di Indonesia tidak hanya bahasa Jawa.

Fenomena gunung es tersebut telah menunjukkan dampak negatif yang nyata, khususnya bagi bahasa daerah, yakni kepunahan bahasa daerah. Seperti yang dilansir *indonesiabaik.id* melalui info grafis yang bersumber dari Kemdikbud pada 30 Januari 2018 dipaparkan bahwa setidaknya terdapat 13 bahasa daerah yang telah punah, antara lain Tandia di Kab. Teluk Mondama Papua, Mawes di Kab. Sarmi Papua, Kajeli/Kayeli di Maluku Tengah, Palumata di Maluku Tengah, Serua di Maluku Tengah, Nila di Maluku Tengah, Piru di Kab. Seram Barat Maluku, Moksela di Kep. Sula Maluku, Ternateno di Ternate Maluku, Hukumina di pulau Buru Maluku, Hoti di Seram Timur Maluku. Selain itu, masih dari sumber yang sama, melalui info grafis yang bertanggal 1 Februari 2018, disebutkan bahwa setidaknya terdapat empat bahasa daerah dalam kondisi kritis terancam punah, antara lain Reta di Kab. Alor NTT, Saponi di Kab. Waropen Papua, Ibo di Kab. Halmahera Barat, dan Meher di Pulau Kisar Maluku, serta 18 bahasa daerah terancam punah, antara lain empat bahasa daerah di Sulawesi yang meliputi Ponosokan, Konjo, Sengihe Talaud, Minahasa/Gorontalo; dua bahasa daerah di Maluku, meliputi Hulung dan Samasuru; satu bahasa daerah di NTT yakni Nadebang; dan sembilan bahasa daerah di Papua, meliputi Mander, Namla, Usku, Maklew/Makleu, Bku, Mansim Borai, Dubu, Irarutu, dan Podena. Tahun demi tahun kepunahan itu pun tentu kian intensif dan massif jika tidak ada langkah yang nyata dari Pemerintah selaku pihak pendominasi yang memungkinkan membuka ruang sosial bagi bahasa daerah dan kesadaran manusia Indonesia sebagai pelaku kebahasaan bahasa daerah.

Bagaimana dengan bahasa Indonesia? Apabila disandingkan dengan bahasa asing

nasibnya kurang lebih hampir sama dengan bahasa daerah dalam konteks tertentu. Akan tetapi, kerentanan kepunahannya tidak setinggi bahasa daerah dengan beberapa pertimbangan, antara lain (1) kehadirannya sebagai *lingua franca* di Indonesia dengan segala variannya; (2) regulasi dari pemerintah guna pemertahanan terhadap eksistensinya; (3) semakin maraknya penyelenggaraan BIPA yang kehadirannya tentu saja sebagai pendukung bahasa Indonesia, baik dalam taraf nasional maupun internasional; dan (4) hadirnya ruang sosial bagi pelaku kebahasaan guna pencapaian ragam modal.

Beberapa pertimbangan tersebut menjadikan optimisme tersendiri bagi eksistensi bahasa Indonesia untuk ke depannya. Hal tersebut diperkuat dengan beberapa penelitian yang telah dilakukan, antara lain (1) Mulyaningsih (2017:79-87) melalui artikel “Sikap Mahasiswa Terhadap Bahasa Indonesia” menyimpulkan bahwa sikap positif/baik dimiliki oleh mahasiswa terhadap bahasa Indonesia; dan (2) Subiyatningsih (2016:147-158) dalam artikel “Sikap Bahasa Remaja: Kasus Pemakaian Bahasa Indonesia Dalam Rubrik “Deteksi” *Jawa Pos*” yang menyimpulkan sikap bahasa remaja sebagai hal positif dengan penekanan terhadap fungsi adaptif dan instrumental.

Berpijak pada paparan yang telah diketengahkan ihwal realitas keberagaman bahasa di alam pelaku kebahasaan manusia Indonesia, seyogyanya sebuah urgensi guna menumbuhkembangkan sikap bahasa yang positif sebagai wujud kedewasaan dalam praktik keberbahasaan. Kemudian bagaimanakah hubungan hal tersebut dengan kesadaran mengenai Indonesia sebagai rumah besar austronesia atau dalam redaksional tulisan ini disebut perspektif ke-austronesian? Jawaban mengenai pertanyaan

tersebut akan diuraikan dalam tulisan ini.

PEMBAHASAN

Sebagai sebuah teori, istilah Austronesia memiliki narasi kesejarahan yang cukup panjang. Austronesia merupakan istilah yang dipopulerkan oleh Schmidt (1899), yang memiliki makna ‘pulau-pulau di selatan’. Tanudirjo (2019:) menerangkan bahwa sebelum ada istilah ‘Austronesia’, beberapa istilah lain telah dipopulerkan, antara lain (1) “*malayisch*” oleh Wilhelm von Humboldt di tahun 1838; (2) “*Malayasich-Polynesich*” oleh Farnz Bopp di tahun 1841; (3) “*malayo-polinesia*” oleh Hendrik Kern di tahun 1889.

Sebelum istilah austronesia diperkenalkan, terlebih dahulu dikenalkan istilah “*malayisch*” oleh Wilhelm von Humboldt (1838) yang berfokus pada kajian bahasa, yakni bahasa Jawa, Melayu, dan Polinesia dan menyimpulkan bahwa bahasa-bahasa ini serumpun. Di tahun 1841, Farnz Bopp memunculkan istilah “*Malayasich-Polynesich*” dengan fokus kajian terhadap bahasa dan menyandingkannya dengan rumpun bahasa Indo-Eropa. Sementara itu, Hendrik Kern (1889) memunculkan istilah *malayo-polinesia*, kemungkinan mengadaptasi istilah “*Malayasich-Polynesich*”, dengan fokus kajian terhadap bahasa dan menyimpulkan bahwa bahasa *malayo-polinesia* berasal dari Annam atau Vietnam Selatan.

Pada tahun 1932, Heine-Geldern mengkaji Austronesia dengan fokus sejarah migrasi penutur Austronesia. Tesis yang dikemukakannya mengungkapkan bahwa terjadi model migrasi dua tahap, yakni (1) gelombang migrasi pertama yang diperkirakan terjadi sekitar 4.000 tahun lalu dan (2) gelombang migrasi kedua yang

diperkirakan terjadi kisaran 2.500 tahun lalu (Tanudirjo, 2019:15). Setelah Heine-Geldern, cukup banyak ahli yang mengkaji mengenai Austroensia yang setidaknya terbagi menjadi dua kelompok yakni kelompok pro dan kelompok kontra dengan teori Heine-Geldern.

Kajian-kajian mengenai Austronesia sudah barang tentu telah banyak dilakukan. Salah satu ahli Austronesia terkhusus berkenaan dengan bidang Arkelogi, yakni Truman Simanjuntak. Dalam tulisannya yang bertajuk “Progres Penelitian Austronesia di Nusantara”, salah satu hal yang ditekankan Simanjuntak (2015:26) mengenai urgensi Indonesia dalam studi Austronesia global dengan pertimbangan bahwa Indonesia yang merupakan kawasan kepulauan dengan letak di tengah kawasan sebaran dan memiliki wilayah luas selayaknya mampu menjadi katalisator persebaran dan interaksi populasi timur-barat. Dengan demikian, hal tersebut menandakan bahwa Indonesia merupakan rumah besar Austronesia.

Berpijak dari kajian-kajian mengenai Austronesia yang telah ada yang menekankan bahwa Indonesia merupakan rumah besar Austronesia, maka kesadaran ke-Austronesiaan bagi manusia Indonesia merupakan hal penting guna mengetahui asal usul manusia Indonesia. Di lain sisi, bahasa merupakan bukti kesejarahan yang “masih hidup” terkait dengan ke-Austronesiaan di Indonesia. Dengan pertimbangan tersebut, maka sikap bahasa manusia Indonesia sebagai praktik kebahasaan dalam perspektif ke-Austronesiaan perlu ditumbuh-kembangkan guna merealisasikan sikap bahasa positif dalam tiap-tiap insan Indonesia.

Gayuh dengan hal tersebut maka dalam hemat penulis, sikap bahasa positif manusia Indonesia sebagai praktik keberbahasaan

dalam perspektif ke-Austronesiaan terbagi atas tiga yakni (1) sikap bahasa yang menempatkan bahasa daerah sebagai bahasa kultural; (2) sikap bahasa yang menempatkan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional; dan (3) sikap bahasa yang menempatkan bahasa asing sebagai bahasa pergaulan internasional. Harapannya, dengan tumbuh dan berkembangnya ketiga sikap bahasa positif tersebut mampu mengurangi sikap berbahasa negatif terhadap ragam bahasa yang ada di Indonesia, baik itu bahasa daerah, bahasa Indonesia, maupun bahasa asing.

Bahasa Daerah sebagai Bahasa Kultural

Bahasa daerah merupakan suatu bahasa yang melambangkan identitas kedaerahan dan dipakai sebagai alat komunikasi internal oleh masyarakat daerah. Berpijak pada kehadiran aksara sebagai alat perekam bahasa, bahasa daerah terbagi atas dua kelompok besar, yakni bahasa daerah beraksara dan bahasa daerah tak beraksara. Aksara yang dimaksud di sini ialah aksara daerah: aksara Jawa, aksara Sunda, aksara Batak, aksara Arab dengan berbagai pengadaptasian Nusantara: Arab Pegon dan arab Jawi, dan lain sebagainya, bukan aksara Latin. Bahasa daerah tak beraksara banyak ditemukan di Indonesia Timur, seperti Papua, sehingga budaya didominasi dengan tradisi lisan.

Memperkarakan mengenai Austronesia di Indonesia maka kita tidak dapat melepaskannya dari bahasa (bahasa daerah) sebagai salah satu wujud budaya dalam paket migrasi manusia atau kelompok manusia Austronesia. Seperti yang telah diketahui bahwa Indonesia memiliki ragam bahasa daerah yang luar biasa jumlahnya, meliputi

bahasa Melayu, bahasa Jawa, bahasa Sunda, bahasa Madura, dan lain sebagainya. Misalkan saja dalam Bahasa Melayu Kuno, Adelaar mengungkapkan setidaknya terdapat ragam varian di Pulau Sumatera, antara lain (1) bahasa Aceh, (2) bahasa Batak, (3) bahasa Melayu, (4) bahasa Rejang, (5) bahasa Lampung, (6) bahasa pulau perbatasan, dan (7) bahasa Enggano (Nasoichah, 2020:17). Itu baru varian satu bahasa daerah saja, sehingga tak terbayangkan begitu kayanya negeri ini dengan bahasa-bahasa daerah yang dimiliki.

Sayangnya, dalam praktik keberbahasaannya, bahasa daerah tidak memiliki habitus, ranah, dan modal layaknya bahasa Indonesia dan bahasa asing. Dari segi habitus, bahasa daerah yang rentan punah biasanya memiliki jumlah penutur yang sedikit sehingga memiliki keterbatasan dalam pewarisan. Berkenaan dengan ranah, tentunya dengan jumlah penutur yang sedikit maka bahasa daerah memiliki ranah yang sempit dalam praktik keberbahasaannya. Sementara itu, berkenaan dengan modal, bahasa daerah yang memiliki jumlah penutur sedikit memiliki cakupan modal yang sempit pula, khususnya berkenaan dengan pemerolehan modal kapital.

Fakta-fakta itulah yang sebenarnya menyebabkan kepunahan bahasa daerah. Karena pertimbangan keterbatasan habitus, modal, dan ranah yang telah dikemukakan, masyarakat pendukung bahasa daerah yang berperan sebagai agen enggan untuk melakukan praktik keberbahasaan bahasa daerah. Guna mengatasi permasalahan tersebut maka perlu ditumbuhkembangkan sikap bahasa positif yang menjadikan bahasa daerah sebagai bahasa kultural. Bahasa kultural dalam konteks ini tidak sebatas sebagai ekspresi kebahasaan

semata akan tetapi juga melingkup mengenai kesejarahan bahasa daerah yang mengacu pada ke-Austronesiaan. Dengan demikian, diharapkan akan tumbuh dan berkembang manusia Indonesia yang sadar akan pentingnya bahasa daerah sebagai bahasa kultural dalam perspektif ke-Austronesiaan dan berupaya untuk melestarikannya sebagai warisan budaya Austronesia dengan perjalanan sejarah yang panjang.

Bahasa Indonesia sebagai Bahasa Nasional

Apabila kita menyimak isi sumpah pemuda, setidaknya terdapat tiga poin penting terkait kebangsaan Indonesia, yakni kesadaran geografis ke-Indonesiaan—bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia—, kesadaran nasionalis ke-Indonesiaan—berbangsa yang satu, bangsa Indonesia—, dan penghormatan terhadap bahasa Indonesia sebagai perajut kesadaran geografis dan nasionalitas—menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia.

Coba kita perdalam terkait dengan isi sumpah Pemuda poin ketiga, “Kami putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa Persatuan, Bahasa Indonesia.” Pada poin ini terdapat perbedaan terkait pemakaian kata kerja ‘verba’ dua poin sebelumnya. Pada poin satu dan dua memakai kata kerja ‘mengaku’ yang merupakan kata kerja bentukan dari prefiks *me-* + kata ‘aku’ yang bermakna menyatakan diri atau secara tersirat menyatakan kesadaran, kesadaran geografis dan nasionalis ke-Indonesiaan. Sementara itu, pada poin ketiga memakai kata kerja ‘menjunjung’ yang merupakan kata kerja bentukan dari prefiks *me-* + kata ‘junjung’, bermakna ‘membawa di

atas kepala' atau dengan kata lain sebuah penghormatan.²

Pemilihan kata 'menjunjung' di situ tentu tidak sembarangan, namun syarat akan pertimbangan, antara lain (1) kesadaran akan berbahasa yang satu (bahasa persatuan) sudah ada sejak lama sebelum hadirnya Sumpah Pemuda, oleh karena itu tidak memakai kata kerja 'mengaku'; (2) menempatkan bahasa sebagai salah satu alat perjuangan, sehingga perlu dilakukan penghormatan dengan menjunjung tinggi bahasa pemersatu; (3) kesadaran akan ihwal ke-Austronesiaan yang terrepresentasikan salah satunya melalui bahasa, yang mana pulau-pulau yang ada di Nusantara di huni suku-suku bangsa yang berasal dari satu nenek moyang.

Dengan demikian, berkenaan dengan bahasa pemersatu itu orang-orang di Nusantara sudah merasakan kehadirannya sejak lama yang mana bahasa pemersatu itu digunakan komunikasi antarsuku bangsa. Selain itu, bahasa pemersatu itu juga digunakan sebagai alat perjuangan melawan kolonialisme Belanda. Akan tetapi, bahasa pemersatu itu belum ditasbihkan menjadi bahasa Indonesia. Kridalaksana (2018) menyebutkan bahwa terjadi silang pendapat antara Yamin dengan M. Tabrani terkait dengan redaksional poin ketiga Sumpah Pemuda, M. Yamin memilih redaksional 'bahasa Melayu' sementara M. Tabrani memilih redaksional 'bahasa Indonesia'. Peristiwa ini terjadi pada saat Kongres Pemuda I pada 2 Mei 1926.

Akhirnya, dipilihlah redaksional bahasa Indonesia yang merupakan bahasa pemersatu

bahasa-bahasa Austronesia di Nusantara. Kenapa bukan bahasa Melayu? Pemilihan redaksional bahasa Indonesia mengacu pada bahasa Melayu pasar yang merupakan alat komunikasi khususnya perdagangan antar-suku bangsa di Nusantara. Ada juga yang menyebutnya Melayu rendah, sebab orang-orang yang merasa memiliki bahasa Melayu asli (Melayu Tinggi) menganggap bahasa tersebut lebih rendah ketimbang bahasa Melayu yang mereka gunakan. Mesti dianggap rendah maupun dianggap tidak Melayu, namun pada kenyataannya memang bahasa itulah yang selama ini menyatukan orang-orang di Nusantara.

Oleh karena itu, poin ketiga Sumpah Pemuda mengandung pesan bahwa penghormatan terhadap bahasa pemersatu, bahasa sebagai alat perjuangan perlu dilakukan dengan menjunjung tinggi bahasa persatuan yang tak lain ialah bahasa Indonesia. Kalau begitu, apakah bahasa Indonesia dapat dikatakan sebagai salah satu ragam bahasa Austronesia. Apabila ditinjau dari segi kesejarahan tentunya ia, sebab bahasa pemersatu yang diakrabi dengan bahasa Melayu Pasar itu sudah ada sejak lama, dan orang-orang yang merasa memiliki bahasa Melayu asli (Melayu Tinggi) juga menyadari hal itu. Menariknya, selain sebagai salah satu bahasa Austronesia, bahasa Indonesia mampu menjadi bahasa pemersatu bahasa-bahasa di Nusantara, hal ini juga berlaku sebelum ada penyebutan bahasa Indonesia—baca Melayu Pasar.

Berpijak dari runutan histori panjang mengenai bahasa Indonesia tersebut, maka sudah layak dan sepatutnya kita menempatkan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Sebagai bahasa yang patut kita banggakan dan selalu junjung tinggi layaknya cita-cita mukadimah yang tertuang dalam Sumpah Pemuda 1928. Selain sebagai

2 Dalam tradisi Jawa, menyembah — meletakkan kedua tangan bertemu muka— yang dilakukan di atas kepala itu ditujukan untuk dewa sebagai bentuk penghormatan tertinggi.

bahasa nasional, bahasa Indonesia juga ditempatkan sebagai bahasa negara. Ihwal ini ditandai dengan penetapannya melalui Pasal 36 UUD 1945 yang berbunyi “Bahasa Negara ialah Bahasa Indonesia”. Dengan penetapan tersebut, maka hal ihwal yang bersifat kenegaraan wajib menggunakan bahasa Indonesia, seperti pidato kenegaraan, komunikasi surat-menyurat pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, dan lain sebagainya yang bersifat kenegaraan.

Kedudukan terakhir bahasa Indonesia yang cukup menarik ialah sebagai bahasa Internasional. Akan tetapi kedudukan bahasa Indonesia yang satu ini masih dalam proses ikhtiar. Meski demikian terdapat data dan fakta menarik mengenai kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa Internasional. *Pertama* Kemasifan lembaga-lembaga ke-BIPA-an –BIPA: Bahasa Indonesia untuk Penutur Asing–. Ihwal tersebut dapat dilihat dari jumlah lembaga-lembaga ke-BIPA-an yang tersebar di berbagai negara di seluruh dunia yang setidaknya berjumlah 129 lembaga dengan rincian sebagai berikut, 42 lembaga di Thailand, 17 lembaga di Filipina, 14 lembaga di Timor Leste, 14 lembaga di Papua Nugini, 7 lembaga di Kamboja, 7 lembaga di Rusia, 6 lembaga di Cina, 6 lembaga di Perancis, 6 lembaga di Australia, 5 lembaga di Amerika Serikat, dan 5 lembaga di Mesir [3]. Sementara itu, di Indonesia sendiri setidaknya terdapat 62 lembaga penyelenggara BIPA yang tersebar di berbagai kota. Meski begitu, fakta ini ibarat pisau bermata dua, antara kebanggaan dan kekhawatiran. Kebanggaan karena banyak orang dari berbagai negara belajar bahasa Indonesia, akan tetapi menjadi kekhawatiran tersendiri sebab sadar maupun tidak, Indonesia merupakan salah satu target pasar yang besar di dunia sehingga orang belajar bahasa Indonesia tak lebih sebagai motif ekonomi guna meraih pasar di Indonesia.

Kedua Amanat dalam UU Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan yang dipertegas PP Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pengembangan Pembinaan Dan Pelindungan Bahasa Dan Sastra Serta Peningkatan Fungsi Bahasa Indonesia dan Peraturan Mendikbud Nomor 42 Tahun 2018 yang menyatakan bahwa Kebijakan Nasional Kebahasaan dan Kesastraan bertujuan memberikan acuan untuk mengatur perencanaan, pengarahannya, dan penyusunan garis haluan kebahasaan yang dipakai sebagai dasar pengelolaan seluruh masalah kebahasaan dan kesastraan. *Ketiga*, dan sekaligus yang terakhir, adanya acara yang digagas oleh Dewan Guru Besar Indonesia (DGBI) pada empat sampai dengan tujuh November 2019 di Surabaya guna pemerjuangan Bahasa Indonesia menjadi bahasa ilmiah internasional. Dalam konteks keilmiahan, bahasa Indonesia memang belum diakui sebagai bahasa ilmiah internasional, salah satu indikatornya yakni dipakai sebagai bahasa pengantar dalam jurnal bereputasi internasional.

Bahasa Asing sebagai Bahasa Keilmuan

Ketika mendengar kata ‘bahasa asing’, sudah barang tentu pikiran kita tertuju pada bahasa Inggris. Faktanya, setidaknya terdapat enam bahasa asing yang diakui sebagai bahasa resmi PBB: Inggris, Prancis, Spanyol, Rusia, Mandarin, dan Arab. Akan tetapi, karena “dominasi” bahasa Inggris begitu kuat sejalan dengan histori kolonialisme yang mereka lakukan, imbasnya persepsi kita dalam memaknai bahasa asing tak lepas dari bahasa Inggris.

Apabila ditelaah dari sisi historis, sebenarnya terdapat dua ‘bahasa asing’

yang diakrabi masyarakat Nusantara, yakni bahasa Sansekerta, dengan aksara Pallawa dan Devanagarinya dan Arab, dengan aksara Arabnya. Anehnya, bahasa asing itu terasa tidak asing karena sangking dekatnya dengan masyarakat Nusantara. Berbeda dengan bahasa-bahasa asing yang masuk pada masa kolonial: Portugal, Belanda, Inggris, bahasa-bahasa yang memang asing dan menjadi asing bagi masyarakat Nusantara. Hal tersebut barangkali tak lepas dari strategi kebahasaan yang dilakukan sang empunya bahasa-bahasa asing yang beda era tersebut.

Sementara itu, apabila bahasa asing yang ada di Indonesia dikaitkan dengan kesejarahan Austronesia, khususnya berkenaan dengan bahasa, maka tidak ada kaitan secara langsung antara keduanya. Mengapa demikian, bahasa-bahasa asing tersebut berasal dari rumpun bahasa yang berbeda atau bukan rumpun bahasa Austronesia. Meski begitu, bahasa-bahasa asing yang ada di Nusantara juga memiliki nilai histori, bahkan cukup mewarnai bahasa-bahasa Austronesia. Hal tersebut nampak dari cukup banyaknya kata bahasa asing yang didapati ke dalam bahasa Austronesia, misalkan banyaknya kata dari bahasa Arab yang diadaptasi ke dalam bahasa Indonesia maupun bahasa daerah.

Keberadaan bahasa asing, khususnya Inggris, mendapat ranah yang begitu luas guna pemerolehan modal kapital: orang melamar kerja, pemerolehan beasiswa, kerap diwajibkan memiliki sertifikat keterampilan bahasa Inggris–TOEFL, IELTS, dll.–sebagai salah satu syarat. Hadirnya ranah ini, berimbas terhadap pengagungan masyarakat, khususnya generasi milenial, terhadap bahasa Inggris. Hal ini bisa kita lihat dari pemakaian kosakata bahasa Inggris dalam pemakaian bahasa Indonesia,

atau sering disebut fenomena indoglis yang cukup masif, mulai dari tempat nongkrong, gaya bahasa para artis, hingga dalam ranah forum ilmiah. Hal tersebut tentu menjadi keprihatinan sendiri, sebab kebanggaan terhadap bahasa asing berimbas terhadap penomorduaan bahasa Indonesia, begitu pula terhadap bahasa daerah.

Hal sebaliknya, juga tidak baik untuk dilakukan, yakni terlalu mengagungkan bahasa Indonesia atau daerah sehingga mengacuhkan bahasa asing. Pilihan tersebut tentu juga kurang bijak, sebab kita urung mampu menunjukkan sikap bahasa yang positif. Walau bagaimana juga, banyak hal yang bisa dipetik dari bahasa asing, salah satu berkenaan dengan keilmuan. Kalau kita acuh dengan bahasa asing karena kebanggaan yang terlampu terhadap bahasa Indonesia atau pun daerah maka kita ibarat katak dalam tempurung yang tak mampu menyerap perkembangan keilmuan dari luar.

SIMPULAN

Sikap Bahasa manusia Indonesia sebagai sebuah praktik keberbahasaan menunjukkan gejala yang negatif yang tak sejalan dengan realitas kebahasaan (bahasa daerah, bahasa Indonesia, dan bahasa asing) yang ada. Imbasnya, timbul pengagungan terhadap asing dan penomorduaan pada bahasa daerah, dan bahkan bahasa Indonesia. Ihwal tersebut juga menjadi salah satu faktor kepunahan bahasa daerah di antara ragam faktor lainnya. Guna mengatasi hal tersebut maka kesadaran ihwal ke-Austronesian dalam praktik keberbahasaan penting untuk ditumbuh-kembangkan sehingga mampu mewujudkan sikap bahasa yang menempatkan realitas kebahasaan yang ada secara bijak, yaitu menempatkan bahasa daerah sebagai

bahasa kultural, mendudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional, dan memosisikan bahasa asing sebagai bahasa keilmuan. Apabila sikap bahasa sebagai praktik keberbahasaan dalam perspektif ke-Austronesiaan dapat terwujud maka akan terjalin harmoni antara realitas kebahasaan yang ada, sebab manusia Indonesia mampu bersikap bijak terhadapnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Bahasa-Bahasa Daerah yang Telah Punah (info grafis). Diunduh dari indonesiabaik.id pada 8 Maret 2020.
- Bahasa Daerah yang Terancam Punah (info grafis). Diunduh dari indonesiabaik.id pada 8 Maret 2020.
- Bahasa Daerah yang Alami Kemunduran (info grafis). Diunduh dari indonesiabaik.id pada 8 Maret 2020.
- Collins, James T. (2014). Keragaman Bahasa dan Kesepakatan Masyarakat: Pluralitas dan Komunikasi. *Dialektika* Vol. 1 No. 2 bulan Desember, 149-180.
- Heine-Geldern. (1945). Science dan Scientists in the Netherland. *Phrehistoric Research in the Netherlands Indies*. New York.
- Mulyaningsih, Indriya. (2017). Sikap Mahasiswa Terhadap Bahasa Indonesia. *Journal Indonesian Language Education and Literature* Vol. 3, No. 1, Desember, 79-87.
- Nasoichah, Churmatin. (2020). Kajian Linguistik Historis Komparatif Terhadap Bahasa Melayu Kuno Pada Penulisan Prasasti Panai. *Purbawidya: Jurnal Penelitian dan Pengembangan Arkeologi* Vol. 9 (1) bulan Juni, 15-30.
- Kridalaksana, Harimurti. (2018). *Masa-masa Awal Bahasa Indonesia*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor.
- UU Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan.
- Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pengembangan Pembinaan Dan Pelindungan Bahasa Dan Sastra Serta Peningkatan Fungsi Bahasa Indonesia.
- Peraturan Mendikbud Nomor 42 Tahun 2018 yang menyatakan bahwa Kebijakan Nasional Kebahasaan dan Kesastraan bertujuan memberikan acuan untuk mengatur perencanaan, pengarahannya, dan penyusunan garis haluan kebahasaan yang dipakai sebagai dasar pengelolaan seluruh masalah kebahasaan dan kesastraan.
- Simanjuntak, Truman. (2015). Progres Penelitian Austronesia di Nusantara. *Amerta: Jurnal Penelitian dan Pengembangan Arkeologi* Vol. 33 No.1 bulan Juni, 1-76.
- Subiyatningsih, Foriyani. (2016). Sikap Bahasa Remaja: Kasus Pemakaian Bahasa Indonesia Dalam Rubrik “Deteksi” *Jawa Pos. Madah, Volume 7, Nomor 2, Edisi Oktober, 147-158*.
- Tanudirjo, Daud Aris. (2019). Mempertanyakan Austronesia, Meneguhkan Identitas Indonesia. *Jejak Austronesia di Indonesia*. Harry Widiyanto (Ed). Yogyakarta: UGM Press.

HASIL DISKUSI

Tanggapan

1. Dr. Rani Siti Fitriani, M.Hum (Universitas Islan Nusantara)

Saya ingin memberikan tanggapan kepada Dr. Arif mengenai sikap

bahasa penutur pada bahasa daerah. Saya pernah melakukan penelitian mengenai sikap remaja Bandung terhadap Bahasa Sunda. Alasan mereka 'enggan' untuk menggunakan Bahasa daerah karena

- 1) dalam bahasa daerah mengenal tingkat tutur sehingga membuat mereka bingung ketika salah menggunakannya. Misalnya kata 'makan' dalam Bahasa Sunda ada mam, dahar, dll. Kata 'tidur' he et, bobo, sare, dll.
- 2) tingkat tutur berkaitan dengan tata krama sehingga mereka selalu diingatkan dengan orang yang lebih tua untuk menggunakan bahasa yang benar/tepat sehingga mereka memilih menggunakan Bahasa Indonesia karena tidak ada tingkat tuturnya. Sama halnya dengan Bahasa Jawa, bahasa ini banyak tersebar tapi tidak dijadikan bahasa yang (universal? Seperti melayu?) karena ada tingkat tuturnya. Lain halnya dengan Bahasa Indonesia.
- 3) kurang keren atau agak gengsi. Ada pergeseran. Berkaitan dengan kepunahan Bahasa Indonesia, saat ini saya pengurus aliansi penggiat Bahasa Indonesia untuk penutur Bahasa Asing, luar biasa perkembangan Bahasa Indonesia ke luar negeri. Hanya tidak dipungkiri, di dalam negeri justru menggunakan Bahasa Asing. Seperti di pesawat, cafe, dll. Selain itu, harus ada revitalisasi untuk bahasa daerah seperti di Papua. Tapi mengenai Bahasa Indonesia, apakah punah? Menurut saya insyaAllah akan hidup."

2. **Dr. Retno Purwanti, M.Hum (Balai Arkeologi Sumatera Selatan)**

Untuk bahasa Indonesia justru saya yakin akan berkembang karena kepala negara se-Asia Tenggara bahwa bahasa indonesia menjadi bahasa resmi asean. Di beberapa negara baik di asia beberapa perguruan tinggi yang fakultasnya ada jurusan bahasa indonesia. Kok di indonesia generasi milineal yang tergila-gila dengan korea belajar bahasa korea, justru artis korea yang belajar bahasa indonesia. Soal pemusnahan bahasa daerah, setelah kami mendapatkan manuskrip-manuskrip dengan akasara lokal, kami bisa mengalih aksarakan tapi kesulitan saat ingin mengetahui isinya. Karena bahasa yang tertulis itu sudah tidak dikenali bahasa saat ini. Beberapa masih dikenali, namun kebanyakan sudah tidak dikenali. Di Sumatera Selatan sendiri ada 69 bahasa pengakuan, sedikit penuturnya. Kepunahan itu amat sangat mengganggu terutama untuk mengetahui isi dari tulisan (naskah-naskah).

3. **Dr. Yayat Hendayana, M.Hum (Universitas Pasundan)**

Membicarakan sikap bahasa, kita baca peraturan Presiden yang mewajibkan seluruh pejabat di Indonesia untuk menggunakan Bahasa Indonesia. Satu hal yang diutarakan Gubernur Jawa Barat, keinginan penggunaan bahasa asing agar program yang dikeluarkan bernuansa global. Saya kira tidak harus begitu, gunakan Bahasa Indonesia dan agar program dikenal oleh masyarakat luas bisa dikenal dengan cara-cara lain. Luar biasa sekali penggunaan bahasa asing seperti *car free day*, *san diego hills*, dll. Kenapa tidak seperti disini Kota

Baru Parahyangan. Tidak ada alasan menggunakan bahasa asing lebih laku dibandingkan dengan bahasa daerah. Teman-teman di Balai Bahasa Bandung pernah mengeluarkan program yang bernama Upaya Pemertabatan Bahasa Indonesia. Kalau ada upaya pemertabatan berarti Bahasa Indonesia sudah tidak bermatabat lagi dan kenyataannya memang begitu. Terkait dengan generasi muda yang tidak suka bahasa sunda, yang salah adalah cara mengajarkan bahasa sunda, mereka mengajarkan bahasa sunda sebagai ilmu bukan sebagai alat komunikasi. Hal yang lain, banyak guru yang mengajarkan bahasa sunda tapi tidak memiliki latarbelakang Bahasa Sunda, seperti di daerah Kuningan ada guru yang mengajar Bahasa Sunda justru dari orang Batak, karena dia bisa Bahasa Sunda. Jadi ukurannya karena dia bisa Bahasa Sunda saja bukan ilmu mendidik. Mestinya yang harus ditumbuhkan di kelas 1 sekolah dasar mereka gembira

menggunakan Bahasa Sunda. Banyak yang mesti kita perbaiki dari dunia pendidikan kita. Itu saya kira beberapa penjelasan.

Tanggapan Pemakalah

Terima kasih untuk Bu Rani untuk masukannya. Dalam paktik kebahasaan, kita juga harus modal kebahasaan. Terkadang anak-anak yang lebih muda, terdominasi melalui tv misalnya ada artis yang suka Bahasa Inggris. Dari habitus itu secara sadar ia bisa menggunakan Bahasa Inggris pada saat praktek. Tapi dengan sikap Bahasa Asing dalam keilmuan ya jangan benci-benci amat.

Terima kasih juga untuk Pak Yayat, memang untuk yang menggunakan Bahasa Asing (keinggris-inggrisan) itu seperti hotel, bisnis sandal, *fashion*, kalo makanan jarang pake bahasa inggris. Data itu saya dapat di Surakarta.